

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUCAHYO, M.M

Jabatan : Inspektur Kabupaten Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M

Jabatan : Bupati Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar,

2017

Pihak Kedua,  
BUPATI KARANGANYAR

Pihak Pertama,  
INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M

Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. Rahasia

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD : INSPEKTORAT

| No | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                      | TARGET  | ALAT UKUR                                                            |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN       | Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan | 10 %    | Jumlah temuan berindikasi kerugian negara dengan jumlah temuan       |
|    |                                                         | Prosentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan PN dan ASN                                                                             | 100 %   | Jumlah seluruh PN dan ASN yang melapor dengan jumlah seluruh ASN     |
|    |                                                         | Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi                                                                      | 100%    | SKPD level terdefinisi dengan jumlah SKPD                            |
|    |                                                         | Level Kapabilitas APIP dengan penilaian menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM).                                            | Level 3 | Penilaian menggunakan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM). |
| 2. | Mewujudkan akuntabilitas kinerja Kabupaten Karanganyar  | Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B                                                                            | 36,6%   | SKPD Nilai evaluasi LAKIP B dibanding jumlah SKPD                    |
| 3. | Mewujudkan akuntabilitas keuangan Kabupaten Karanganyar | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah                                                                                                 | WTP     | Hasil pemeriksaan BPK                                                |
| 4. | Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat    | Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti                                                                                           | 100%    | Tindaklanjut aduan disbanding dengan aduan yang masuk                |

### Program

|    |                                                                                           |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | 594.170.500,00   |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                         | 110.992.000,00   |
| 3. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | 133.100.000,00   |
| 4. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                          | 140.027.000,00   |
| 5. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.961.334.500,00 |

### Anggaran

### Keterangan

- |    |                                                                              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6. | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 119.200.500,00 |
| 7. | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan  | 29.955.500,00  |
| 8. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi                         | 33.920.000,00  |

BUPATI KARANGANYAR

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M

Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. *Rahasia*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SEKRETARIS INSPEKTORAT**

| No. | SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                              | SATUAN | TARGET    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                            |        | (4)       |
| 1.  | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur, Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Perekonomian, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat | Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah                                   | 100%   | persen    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan                                            | 30%    | Persen    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prosentasi tindak lanjut dengan rekomendasi                                                                                    | 95%    | prosen    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti                                                                                   | 100%   | Persen    |
| 2.  | Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik                                                                                                                                                                                                                                     | Prosentase dokumen perencanaan yang telah sesuai ketentuan                                                                     | 100%   | prosen    |
| 3.  | Terwujudnya pengawasan yang sinergi dan terkordinasi                                                                                                                                                                                                                           | Prosentase Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT                                                                          | 100%   | prosen    |
| 4.  | Terwujudnya pengendalian tindak pidana korupsi                                                                                                                                                                                                                                 | Prosentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan PN dan ASN                                                                     | 100%   | persen    |
| 5.  | Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                       | Prosentase laporan keuangan yang telah memenuhi SAP dan peraturan                                                              | 100%   | persen    |
| 6.  | Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, Keandalan pelaporan keuangan, Pengamanan aset negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.                                                                          | Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdifikasi                                                              | 100%   | Persen    |
| 7.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                              | Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B                                                                    | 36,59% | Persen    |
| 8.  | Peningkatan profesionalisme APIP                                                                                                                                                                                                                                               | Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mendapatkan Sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi | 100%   | prosen    |
| 9.  | Peningkatan dan pengembangan Laporan kinerja dan laporan keuangan                                                                                                                                                                                                              | Prosentase jumlah pengelolaan administrasi pejabat fungsional khusus yang sesuai ketentuan                                     | 100%   | prosen    |
| 10. | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah informasi publik yang diunggah di website Inspektorat per tahun                                                         | 36     | informasi |

**Program**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

**Anggaran**

594.170.500,00  
110.992.000,00

**Keterangan**

|    |                                                                                           |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | 133.100.000,00   |
| 4. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                          | 140.027.000,00   |
| 5. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.961.334.500,00 |
| 6. | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan              | 119.200.500,00   |
| 7. | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan               | 29.955.500,00    |
| 8. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi                                      | 33.920.000,00    |

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. Rahasia

SITI ISWARI H, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. Rahasia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
INSPEKTORAT PEMBANTU  
BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN APARATUR

| No. | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                               | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                             | (4)    |
| 1.  | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, untuk kegiatan :<br>1. Reviu Laporan Keuangan Daerah<br>2. Reviu Dokumen Perencanaan                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Daerah berdasarkan SAP                                                                              | 100%   |
| 2.  | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, untuk kegiatan :<br>1. Pelaksanaan pengawasan internal secara reguler<br>2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah<br>3. Pelaksanaan pemeriksaan khusus | Terwujudnya pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan kepala daerah. | 100%   |

| Program                                                                                      | Anggaran         | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                          | 140.027.000,00   |            |
| 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.961.334.500,00 |            |

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT PEMBANTU  
BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM  
DAN APARATUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. Rahasia

AGUNG WAHYU UTOMO, S.S.T.P.  
Pembina  
NIP. Rahasia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**INSPEKTORAT PEMBANTU**  
**BIDANG PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH**

| No. | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                               | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                             | (4)    |
| 1.  | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, untuk kegiatan :<br>1. Reviu Laporan Keuangan Daerah<br>2. Reviu Dokumen Perencanaan                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Daerah berdasarkan SAP                                                                              | 100%   |
| 2.  | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, untuk kegiatan :<br>1. Pelaksanaan pengawasan internal secara reguler<br>2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah<br>3. Pelaksanaan pemeriksaan khusus | Terwujudnya pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan kepala daerah. | 100%   |

| Program                                                                                      | Anggaran         | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                          | 140.027.000,00   |            |
| 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.961.334.500,00 |            |

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT PEMBANTU  
BIDANG PENDAPATAN DAN  
PENGELOLAAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. Rahasia

SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. Rahasia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
INSPEKTORAT PEMBANTU  
BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| No. | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                               | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                             | (4)    |
| 1.  | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, untuk kegiatan :<br>1. Reviu Laporan Keuangan Daerah<br>2. Reviu Dokumen Perencanaan                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Daerah berdasarkan SAP                                                                              | 100%   |
| 2.  | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, untuk kegiatan :<br>1. Pelaksanaan pengawasan internal secara reguler<br>2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah<br>3. Pelaksanaan pemeriksaan khusus | Terwujudnya pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan kepala daerah. | 100%   |

| Program                                                                                      | Anggaran         | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                          | 140.027.000,00   |            |
| 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.961.334.500,00 |            |

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT PEMBANTU  
BIDANG PEREKONOMIAN,  
PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
HIDUP  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. Rahasia

Drs. SUHARDI, S.E., M.M., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. Rahasia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**INSPEKTORAT PEMBANTU**  
**BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

| No. | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                               | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                             | (4)    |
| 1.  | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, untuk kegiatan :<br>1. Reviu Laporan Keuangan Daerah<br>2. Reviu Dokumen Perencanaan                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Daerah berdasarkan SAP                                                                              | 100%   |
| 2.  | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, untuk kegiatan :<br>1. Pelaksanaan pengawasan internal secara reguler<br>2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah<br>3. Pelaksanaan pemeriksaan khusus | Terwujudnya pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan kepala daerah. | 100%   |

| Program                                                                                      | Anggaran         | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                          | 140.027.000,00   |            |
| 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.961.334.500,00 |            |

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT PEMBANTU  
BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUCAHYO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. Rahasia

Drs. SURIPTO, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. Rahasia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian

| No. | KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA                    | TARGET |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                          | (3)                                  | (4)    |
| 1.  | Penyediaan jasa surat menyurat                               | 130 benda pos                        | 100%   |
| 2.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                    | 1 paket                              | 100%   |
| 3.  | Penyediaan peralatan rumah tangga                            | 1 paket, 12 kali retribusi sampah    | 100%   |
| 4.  | Penyediaan bahan logistik kantor                             | 12 bulan                             | 100%   |
| 5.  | Penataan/Penyediaan bahan arsip/dokumen daerah               | 4 kali                               | 100%   |
| 6.  | Pengadaan mebeleur                                           | 1 set                                | 100%   |
| 7.  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                     | 12 laporan                           | 100%   |
| 8.  | Pengelolaan Administrasi PFA                                 | 35 PAK                               | 100%   |
| 9.  | Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD               | 100 % wajib LHKPN melaporkan LHKPN   | 100%   |
| 10. | Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar    | 100 % wajib LHKASN melaporkan LHKASN | 100%   |
| 11. | Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara                     | 12 bulan                             | 100%   |
| 12. | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan | 130 benda pos                        | 100%   |

**Kegiatan**

|                                                                  | <b><u>Anggaran</u></b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Penyediaan jasa surat menyurat                                | 17.814.800             |
| 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     | 59.512.500             |
| 3. Penyediaan peralatan rumah tangga                             | 12.914.000             |
| 4. Penyediaan bahan logistik kantor                              | 29.280.000             |
| 5. Pengadaan mebeleur                                            | 8.000.000              |
| 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                      | 48.290.000             |
| 7. Penataan/Penyediaan bahan arsip/dokumen daerah                | 6.035.000              |
| 8. Pengelolaan Administrasi PFA                                  | 24.900.000             |
| 9. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD                | 92.200.000             |
| 10. Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar    | 22.555.000             |
| 11. Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara                     | 44.200.000             |
| 12. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan | 37.830.000             |

**Keterangan**

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Administrasi,  
Umum, dan Kepegawaian

SITI ISWARI H, SE, MM  
Pembina Tingkat I

NIP. Rahasia

RIYASI, S.Sos, MM  
Pembina

NIP. Rahasia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

| No  | KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR KINERJA     | TARGET |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                  | (3)                   | (4)    |
| 1.  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                              | 12 bulan              | 100%   |
| 2.  | Penyediaan alat tulis kantor                                                         | 8 unit mobil          | 100%   |
| 3.  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                | 1 paket               | 100%   |
| 4.  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional               | 12 bulan              | 100%   |
| 5.  | Pengadaan peralatan gedung kantor                                                    | 1 unit                | 100%   |
| 6.  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                 | 1 paket pemeliharaan  | 100%   |
| 7.  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                   | 1 LHR                 | 100%   |
| 8.  | Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi                                            | 8 kajian              | 100%   |
| 9.  | Review Laporan Keuangan Daerah                                                       | 12 bulan              | 100%   |
| 10. | Inventarisasi temuan pengawasan                                                      | 6 laporan             | 100%   |
| 11. | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan                                                | 3 laporan             | 100%   |
| 12. | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif                                        | 1 Kegiatan            | 100%   |
| 13. | Pelaksanaan LARWASDA                                                                 | 5 Laporan Hasil Monev | 100%   |
| 14. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | 5 SKPD                | 100%   |
| 15. | Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD                                               | 3 bulan pendampingan  | 100%   |
| 16. | Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi                                                 | 12 bulan              | 100%   |
| 17. | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH                                     | 100 %                 | 100%   |
| 18. | Fasilitasi Korsupgah                                                                 | 4 OPD                 | 100%   |
| 19. | Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas                                             | 12 bulan              | 100%   |
| 20. | Pengelolaan/Pemeliharaan Website                                                     | 8 unit mobil          | 100%   |

| Kegiatan                                                                                 | Anggaran    | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 130.800.000 |            |
| 2. Penyediaan alat tulis kantor                                                          | 59.962.500  |            |
| 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | 12.622.000  |            |
| 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                | 131.416.700 |            |
| 5. Pengadaan peralatan gedung kantor                                                     | 19.500.000  |            |
| 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 70.000.000  |            |
| 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                    | 22.580.000  |            |
| 8. Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi                                             | 68.766.500  |            |
| 9. Review Laporan Keuangan Daerah                                                        | 60.027.000  |            |
| 10. Inventarisasi temuan pengawasan                                                      | 12.331.500  |            |
| 11. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan                                                | 275.000.000 |            |
| 12. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif                                        | 50.000.000  |            |
| 13. Pelaksanaan LARWASDA                                                                 | 60.000.000  |            |
| 14. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | 35.246.000  |            |

|                 |                                                  |                 |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 15.             | Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD           | 79.906.500      |                   |
| 16.             | Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi             | 26.861.000      |                   |
| <b>Kegiatan</b> |                                                  | <b>Anggaran</b> | <b>Keterangan</b> |
| 17.             | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH | 30.596.000      |                   |
| 18.             | Fasilitasi Korsupgah                             | 41.808.500      |                   |
| 19.             | Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas         | 35.142.000      |                   |
| 20.             | Pengelolaan/Pemeliharaan Website                 | 33.920.000      |                   |

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian  
Evaluasi dan Pelaporan

SITI ISWARI H, SE, MM  
Pembina Tingkat I

NIP.

Sridanarto Latnokusumo, ST, MM  
Penata Tingkat I

NIP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018****Kepala Sub Bagian Perencanaan**

| No. | KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| (1) | (2)                                                          | (3)               | (4)    |
| 1   | Penyediaan bahan logistik kantor                             | 12 bulan          | 100%   |
| 2   | Penyediaan makanan dan minuman                               | 3313 dos          | 100%   |
| 3   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan     | 12 eksemplar      | 100%   |
| 4   | Pelaksanaan Evaluasi LAKIP                                   | 15 LHR SKPD       | 100%   |
| 5   | Review RKA SKPD                                              | 40 LHR            | 100%   |
| 6   | Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala               | 144 OBRIK         | 100%   |
| 7   | Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah   | 12 bulan          | 100%   |
| 8   | Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus                               | 12 bulan          | 100%   |
| 9   | Pelaksanaan PKS/Ekspose                                      | 13 kegiatan       | 100%   |
| 10  | Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)   | 1 Dokumen PKPT    | 100%   |
| 11  | Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) | 45 OPD            | 100%   |

| Kegiatan                                                        | Anggaran    | keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1 Penyediaan bahan logistik kantor                              | 29.280.000  |            |
| 2 Penyediaan makanan dan minuman                                | 74.995.000  |            |
| 3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan      | 1.440.000   |            |
| 4 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP                                    | 16.000.000  |            |
| 5 Review RKA SKPD                                               | 80.000.000  |            |
| 6 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala                | 980.061.500 |            |
| 7 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah    | 65.000.000  |            |
| 8 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus                                | 104.955.000 |            |
| 9 Pelaksanaan PKS/Ekspose                                       | 75.000.500  |            |
| 10 Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)   | 29.955.500  |            |
| 11 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) | 35.275.000  |            |

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan

SITI ISWARI H, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. Rahasia

Dra. Sunarmi, MM

Pembina

NIP. Rahasia